

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBENTUK KARAKTER DEMOKRATIS SISWA DI SEKOLAH SMA NEGERI 2 PERCUT SEI TUAN

Asianna Manik¹, Lammarito Lumban Gaol², Pebriana Panjaitan³, Ulfa Fatimah⁴,
Halking⁵

¹PPKn FIS Universitas Negeri Medan

²PPKn FIS Universitas Negeri Medan

³PPKn FIS Universitas Negeri Medan

⁴PPKn FIS Universitas Negeri Medan

⁵PPKn FIS Universitas Negeri Medan

¹asiannamanik68@gmail.com; ²lammaritogaol@gmail.com;

³pebrianapanjaitan8@gmail.com, ⁴fatimahulfa40@gmail.com,

⁵halking123@unimed.ac.id

ABSTRACT

Political education is an important effort in shaping democratic character in students, especially in the school environment as a social space that plays a role in instilling values, attitudes, and behavior of citizenship. More than just delivering material, political education is a process of forming a democratic culture that encourages students to understand their rights and obligations, respect differences, participate in decision-making, and be able to apply the values of deliberation in everyday life. The problem examined in this mini-research report is how the implementation of political education is carried out at SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan and the extent to which this process contributes to shaping students' democratic character. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and observations. The theoretical basis is used as a guide so that the research focus is in line with the phenomena occurring in the field, while the analysis is carried out systematically based on empirical findings. The results of the study indicate that the implementation of political education at SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan has been carried out through PPKn learning, OSIS activities, class president elections, and other organizational activities. Democratic values such as deliberation, tolerance, openness, and respect for opinions are evident in student interactions, especially when they are involved in discussions and decision-making. Despite this, students' understanding of political concepts remains uneven, as learning tends to focus on theory and is not contextualized.

Keywords: Political Education, Democratic Character, High School Students

ABSTRAK

Pendidikan politik merupakan salah satu upaya penting dalam membentuk karakter demokratis pada peserta didik, terutama di lingkungan sekolah sebagai ruang sosial yang berperan dalam menanamkan nilai, sikap, dan perilaku kewarganegaraan. Lebih dari sekadar penyampaian materi, pendidikan politik merupakan proses pembentukan budaya demokrasi yang mendorong siswa untuk memahami hak dan kewajiban, menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mampu menerapkan nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang dikaji dalam laporan mini riset ini adalah bagaimana implementasi pendidikan politik dilakukan di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan serta sejauh mana proses tersebut berkontribusi dalam membentuk karakter demokratis siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Landasan teori digunakan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sementara analisis dilakukan secara sistematis berdasarkan temuan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan telah berjalan melalui pembelajaran PPKn, kegiatan OSIS, pemilihan ketua kelas, dan aktivitas organisasi lainnya. Nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap pendapat terlihat dalam interaksi siswa, terutama saat mereka terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Meskipun demikian, aspek pemahaman siswa mengenai konsep politik masih belum merata, karena pembelajaran cenderung berfokus pada teori dan belum dikemas secara kontekstual. Hambatan lain yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu pembelajaran, kurangnya variasi metode mengajar, serta minimnya literasi politik pada sebagian siswa.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Karakter Demokrasi, Siswa SMA

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, termasuk dalam menyiapkan mereka menjadi warga negara yang baik. Salah satu aspek yang sangat penting adalah pendidikan politik, sebab melalui proses ini siswa dapat memahami hak dan kewajiban, menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, serta

belajar berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Perkembangan era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan arus informasi membawa pengaruh besar terhadap pola pikir remaja. Walaupun memberikan banyak manfaat, kondisi ini juga sering menimbulkan dampak negatif seperti sikap acuh terhadap politik, kurangnya toleransi, hingga

perilaku yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Situasi ini menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai demokratis melalui pendidikan politik yang terarah. Pendidikan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik yang dapat bermanfaat di kehidupan sekarang dan yang akan datang. (Rarasanti dkk., 2021) mengatakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara adalah pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pendidikan perlu dilakukan (Fidyaningrum & Prasetyo, 2023).

Pendidikan politik adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterlibatan individu dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik (Fernando & Sirozi, 2024). Dalam Pendidikan politik berfokus kepada aspek politik didalam masyarakat, seperti pada sistem politik, proses pengambilan keputusan, partisipasi politik, hak dan kewajiban politik, dan nilai-nilai

demokrasi, oleh sebab itu tujuan dari pendidikan politik ini adalah untuk menjadikan masyarakat sadar akan hak-hak politiknya dan mereka mampu untuk berkontribusi secara aktif dalam proses politik. Sehingga masyarakat memiliki sikap toleransi, menghargai kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan, serta mampu membuat keputusan yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam proses demokrasi. Pancasila yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya, karena setiap butir pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia (Sianturi & Dewi, 2021). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa terus dikembangkan dan disampaikan kepada orang banyak. Pembentukan karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila bertujuan agar masyarakat dapat menyatakan dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat mendorong Indonesia mencapai tujuan negara (Tirza & Cendana, 2021). Oleh sebab itu Implementasi nilai-nilai Pancasila

sebagai dasar negara telah menjadi pijakan utama dalam menjalankan sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

Implementasi aspek kognitif dalam pendidikan politik yaitu untuk membangun pengetahuan politik siswa agar mereka memiliki kesadaran politik terlebih dalam menerapkan nilai-nilai ideologi Pancasila yang sesuai dengan nilai ke-lima sila Pancasila. Salah satu sarana penyelenggara pendidikan politik tersebut dapat direalisasikan kepada organisasi yang ada di sekolah. Hal ini merupakan pengembangan potensi generasi muda dalam pengetahuan dan pemahaman pendidikan politiknya yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga mampu membentuk karakter Pancasila bagi para generasi muda (Sanusi & Darmawan, 2016). Sehingga melalui pemberian aspek kognitif pendidikan politik terhadap generasi muda disekolah, maka membantu siswa di sekolah untuk lebih memahami dan mengerti tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta bagaimana cara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Implementasi aspek afektif dalam

pendidikan politik harus dimulai dengan membangun kesadaran politik pada siswa di sekolah. Kesadaran politik akan membantu siswa memahami pentingnya partisipasi politik dalam pembangunan mereka. Pendidikan politik harus membantu siswa membangun nilai-nilai yang positif dalam politik yang berdasarkan kepada nilai-nilai ideologi Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Implementasi aspek psikomotorik dalam pendidikan politik sangat penting dalam upaya penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila siswa di sekolah. Aspek psikomotorik sendiri berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengendalikan gerakan fisik dan keterampilan motoriknya. Dalam konteks pendidikan politik, implementasi aspek psikomotorik dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami isu politik dan melaksanakan aksi politik yang efektif dan efisien.

Melalui proses pembelajaran, kegiatan organisasi, serta aktivitas ekstrakurikuler, sekolah berperan dalam membiasakan siswa untuk menerapkan nilai demokrasi, seperti

mengambil keputusan secara musyawarah, menghargai perbedaan pandangan, serta menanamkan rasa tanggung jawab. Dengan cara tersebut, pendidikan politik tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam keseharian siswa. Meski demikian, pelaksanaan pendidikan politik di sekolah masih menemui kendala. Rendahnya pemahaman siswa mengenai pentingnya sikap demokratis, keterbatasan metode guru, serta kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi aktif menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal pendidikan politik dengan kondisi nyata di lapangan.

Maka dari itu penelitian ini sangat penting dilakukan karena pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan membangun negara yang berdaulat. Adapun judul dari penelitian ini yaitu **“Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Demokratis Siswa di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan”**. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pendidikan politik di sekolah, kontribusinya

terhadap pembentukan karakter demokratis siswa, serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan politik di lingkungan sekolah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini data berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan yang beralamat di Jl. Pasar VII Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024/2025 selama kurang lebih tiga bulan, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Pendidikan Politik Melalui Kegiatan Demokrasi Sekolah

Pendidikan politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa pendidikan politik di sekolah tidak hanya berarti memberikan pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan keterampilan politik yang demokratis. Dengan demikian, pendidikan politik mencakup tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan siswa SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, pendidikan politik di sekolah tersebut tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh siswa.

Temuan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan politik di tingkat menengah umumnya bersifat integratif dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Guru

PPKn menjelaskan bahwa pendidikan politik diimplementasikan melalui penyampaian materi tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta partisipasi politik. Dalam kajian teori, dijelaskan bahwa PPKn adalah sarana utama pendidikan politik di sekolah karena mata pelajaran ini secara normatif mengandung nilai-nilai politik demokratis yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan guru PPKn di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan mencerminkan penerapan konsep teoritis tersebut dalam konteks pembelajaran.

Namun, guru juga mengakui bahwa pendidikan politik yang diberikan lebih cenderung berupa praktik daripada pemahaman konsep secara mendalam. Hal ini terlihat dari kurangnya adanya modul atau materi ajar khusus tentang pendidikan politik. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep normatif pendidikan politik dalam teori dengan praktik di lapangan. Meskipun demikian, dalam Teori pendidikan politik ditegaskan bahwa pengalaman langsung dan pembiasaan memiliki peran penting dalam proses

internalisasi nilai – nilai politik , sehingga praktik yang dilakukan sekolah tetap memiliki nilai pedagogis yang signifikan.

Salah satu bentuk penerapan pendidikan politik di sekolah adalah melalui kegiatan demokrasi sekolah, seperti pemilihan ketua organisasi siswa, forum musyawarah, dan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Kegiatan ini dianggap sebagai tempat praktik demokrasi yang membantu siswa mendapatkan pengalaman politik awal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan telah melakukan berbagai kegiatan demokrasi sekolah, terutama melalui OSIS dan pemilihan ketua kelas. Siswa diminta untuk terlibat dalam proses pemilihan, mulai dari mengajukan calon, kampanye hingga pemungutan suara . Kegiatan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan politik akan lebih efektif jika siswa dilibatkan secara aktif dalam proses demokrasi, bukan hanya diterima sebagai objek pembelajaran.

Hasil wawancara MR Guru PPKn menyatakan bahwa melalui kegiatan tersebut, siswa belajar tentang prinsip keadilan, keadilan, dan tanggung

jawab. Temuan ini memperkuat teori tentang karakter demokrasi yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam membentuk sikap demokratis. Pendidikan politik menjadi sarana untuk membentuk siswa yang tidak hanya memahami demokrasi secara teori, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sosial . Namun, partisipasi siswa dalam kegiatan demokrasi masih tidak merata. Beberapa siswa aktif berpartisipasi, sementara yang lain cenderung tidak ikut. Dari sudut pandang teori, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik perlu dirancang secara lebih inklusif agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berpartisipasi.

4.2.2 Pendidikan Politik Sebagai Proses Pembentukan Kesadaran Politik dan Karakter Demokrasi Siswa

Tujuan utama dari pendidikan politik adalah membentuk kesadaran politik para peserta didik agar mereka memahami posisi dan peran mereka sebagai warga negara. Kesadaran politik mencakup pemahaman tentang hak-hak politik , tugas dan kewajiban warga negara, serta kemampuan untuk berpikir kritis terhadap

lingkungan sosial dan politik. Berdasarkan hasil wawancara, siswa di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan menunjukkan tingkat kesadaran politik yang cukup baik dalam konteks sekolah. Mereka mampu mengenali aktivitas demokratis seperti pemilihan OSIS, musyawarah kelas, dan diskusi kelompok sebagai bagian dari praktik pendidikan politik. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kesadaran politik dapat berkembang melalui pengalaman langsung dalam lingkungan terdekat siswa, termasuk lingkungan sekolah.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik siswa belum didukung oleh pemahaman konseptual yang kuat. Beberapa siswa mengaku memahami pendidikan politik hanya sebagai aktivitas memilih dan musyawarah, tanpa mampu menjelaskan makna pendidikan politik secara teoritis. Dilihat dari perspektif teori, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan masih lebih condong pada aspek afektif dan psikomotorik, sedangkan aspek kognitif perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, teori pendidikan politik menegaskan bahwa

kesadaran politik tidak selalu bermula dari pemahaman teori yang mendalam, tetapi bisa berkembang melalui pembiasaan dan pengalaman. Oleh karena itu, temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemahaman siswa masih terbatas, proses pembentukan kesadaran politik telah berlangsung secara bertahap.

Karakter demokratis adalah salah satu sifat penting yang diharapkan dapat terbentuk melalui pendidikan politik. Karakter demokratis mencakup sikap menghargai perbedaan pendapat, toleransi, sikap terbuka, tanggung jawab, serta siap menerima keputusan bersama. Berdasarkan hasil wawancara, karakter demokratis para siswa SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berpartisipasi dalam diskusi dan musyawarah. Siswa menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dan mampu menerima hasil keputusan bersama, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sesuai dengan keinginan pribadi. Penemuan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa karakter demokratis terbentuk melalui pembiasaan yang terus-

menerus dalam lingkungan sosial siswa.

Hasil wawancara dari Guru PPKn menunjukkan bahwa karakter demokratis siswa lebih terlihat dalam tindakan nyata dibandingkan kemampuan berbicara atau pemahaman teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik di sekolah lebih berhasil dalam membentuk sikap dan perilaku daripada hanya memperkuat pengetahuan teoritis. Dalam kajian teori tentang karakter, kondisi ini dianggap sebagai tahap awal yang penting dalam pembentukan karakter, karena sikap dan kebiasaan menjadi dasar bagi peningkatan pengetahuan di masa depan.

Namun, masih ada tantangan dalam pembentukan karakter demokratis siswa. Beberapa siswa menunjukkan sikap apatis atau kurang tertarik terhadap kegiatan politik di sekolah. Dalam perspektif teori, sikap ini bisa dipengaruhi oleh persepsi negatif terhadap politik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan politik di sekolah perlu memberikan pemahaman yang lebih positif dan kontekstual mengenai makna politik.

4.2.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Politik

Pendidikan politik di sekolah bisa berhasil karena ada beberapa faktor, seperti peran guru, lingkungan sekolah, dan cara mengajar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran guru PPKn adalah faktor penting dalam menerapkan pendidikan politik di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan. Guru PPKn bertugas sebagai fasilitator dan contoh dalam membentuk nilai - nilai demokrasi. Guru berusaha menciptakan suasana kelas yang ramah, terbuka, dan menghargai pendapat siswa. Peran ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa guru bidang kewarganegaraan harus menjadi teladan dalam praktik demokrasi bagi siswa. Selain itu, lingkungan sekolah yang mendukung praktik demokrasi juga menjadi faktor penting. Adanya organisasi siswa dan forum diskusi memberi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi. Dalam teori, lingkungan belajar yang demokratis dianggap sebagai syarat utama keberhasilan pendidikan politik .

Pendidikan politik di sekolah sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan waktu, materi

ajar, dan minat siswa. Penelitian di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan menunjukkan adanya hambatan yang sama. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman konsep siswa mengenai pendidikan politik. Siswa lebih menganggap pendidikan politik sebagai sesuatu yang praktis tanpa memahami teori di baliknya. Selain itu, keterbatasan materi ajar dan waktu pembelajaran juga menjadi tantangan bagi guru dalam memberikan materi secara menyeluruh. Hambatan lainnya adalah persepsi siswa terhadap politik yang masih dianggap rumit dan kurang menarik. Dalam teori, persepsi negatif seperti ini bisa mengurangi minat dan partisipasi siswa dalam pendidikan politik.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi pendidikan politik dalam membentuk karakter demokratis siswa di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik di sekolah telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Pemahaman siswa tentang pendidikan politik masih beragam; sebagian siswa sudah

memahami bahwa pendidikan politik berkaitan dengan pembelajaran mengenai pemerintahan, demokrasi, partisipasi masyarakat, serta nilai-nilai Pancasila, sementara sebagian lainnya masih menganggap materi politik sebagai sesuatu yang abstrak karena penyampaian guru lebih banyak berfokus pada teori. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kognitif siswa mengenai politik belum merata dan masih membutuhkan penguatan melalui metode pembelajaran yang lebih menarik dan kontekstual. Walaupun demikian, nilai-nilai demokrasi telah tampak dalam sikap siswa ketika menghadapi perbedaan pendapat. Praktik demokrasi yang diperoleh siswa melalui kegiatan OSIS, pemilihan ketua kelas, rapat organisasi, dan musyawarah kelompok juga menjadi sarana yang sangat penting dalam membentuk keterampilan berpendapat, mengambil keputusan, dan bekerja sama. Pengalaman langsung ini menjadikan aspek psikomotorik siswa lebih berkembang dibandingkan pemahaman konseptualnya.

Namun implementasi pendidikan politik masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterikatan guru terhadap kurikulum, penggunaan

metode pembelajaran yang kurang variatif, serta minimnya pembelajaran politik yang berbasis pengalaman. Guru juga mengakui bahwa rendahnya minat dan pemahaman siswa dalam bidang politik membuat mereka cenderung pasif ketika materi disampaikan secara teoretis. Di sisi lain, kegiatan demokrasi sekolah belum dimaksimalkan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang terstruktur sehingga siswa memperoleh pengalaman demokratis secara spontan, bukan sebagai bagian dari sistem pendidikan politik yang dirancang secara menyeluruh. Meskipun demikian, baik guru maupun siswa sama-sama memiliki harapan agar pendidikan politik di sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih menarik dan aplikatif. Secara keseluruhan, karakter demokratis siswa memang telah terbentuk melalui pengalaman organisasi, namun peningkatan kualitas pembelajaran politik tetap diperlukan agar siswa tidak hanya terampil secara praktik, tetapi juga memahami dasar-dasar politik secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ditulis mengacu kepada standar APA 6th dengan panduan sebagai berikut :

Buku :

- Abdussamad, Z. *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Syakir Media Press, 2021.
- Cholisin. (2004). *Diklat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*.
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. "Metodologi Penelitian Kualitatif." 2022.
- Halking, Hodriani, & Khalehar, F. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Politik*.
- Muhyiddin, N. T., Tarmizi, M. I., & Yulianita, A. (2017). Teori, Kajian Literatur dan Hipotesis. In *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*.
- Sirajuddin Saleh. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180.
- Sugiyono. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. ." 2013.

Jurnal :

- Apria Sagita, K., & Purwosaputro, S. (2022). Implementasi Pendidikan Politik Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wanasari Kabupaten Brebes. *Jurnal Spirit Edukasia*, 02(02), 268–271.
- Dekki , Ra'is Umamur . "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan

- Akuntabilitas Sosial." *Jurnal Sosiologi*, 2022. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v5i2.11205>
- Fatimah, N., Mujiyanto, G., & Yudiantoro, K. (2023). Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum Merdeka Siswa Kelas IB SDN 02 Girimoyo Malang Melalui Problem Based Learning. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2024). Pengertian "Politik Pendidikan" dan Perbedaannya dengan "Pendidikan Politik" dan "Politisasi Pendidikan." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10994–11000.
- Fidyaningrum, R. A., & Prasetyo, W. H. (2023). Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pada Kurikulum Merdeka. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 87–96.
- Gobel, E. Y., Yunus, R., & Mahmud, R. (2021). Implementasi Pendidikan Politik Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler Di Sma Negeri 1 Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jambura Journal Civic Education*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v1i1.11131>
- Hamisa, W., & Murdiyono, M. (2018). Peran PKn sebagai pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi di SMA. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(2), 192–201.
- Ikbal, Muhammad, and Jabbar Abdul. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Wedana* Vol. V, No. 1 (April 2019): 581-588.
- Jakak, P. M., Rifa, M. N., & Azizah, B. (2023). Peranan Pancasila dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 11–21.
- Kadek, Wijayanto, Tijow Margareth Lusiana, and Wantu M. Fence. "Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional." *Jurnal Ius Civile*, 2020.
- Mahardin, Ahmad Fauzan, Muliati, & Nurmawadah Rahmah. (2021). Pembentukan Karakter Demokratis Melalui Pelaksanaan Metode Pembelajaran Kooperatif tipe Number Head Together pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Kota Bima. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1), 107–112. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i1.1342>
- Mujahidin, M. D., Yani, M. T., & Harmanto. (2025). Kajian Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Manajemen Krisis: Pembelajaran dari Situasi Pasca Konflik. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 51–61.
- Mulyadi, M. (2013). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian.

-
- Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71.
<https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>
- Na'imah, I., & Bawani, I. (2021). Penanaman Pendidikan Karakter Demokratis Di Pondok Pesantren. *Jurnal Muara Pendidikan*, 6(2), 228–236.
<https://doi.org/10.52060/mp.v6i2.604>
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442.
- Rahmadi, S.Ag., M. P. . (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8).
- Ra'is, Dekki Umamur. "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial." *Jurnal Of Urban Sosiologi* Vol. 5, No. 2 (November 2022).
- Rambe, N. A. (2023). Implementasi Model Role Playing untuk Meningkatkan Nilai-Nilai Karakter Demokrasi dalam Pembelajaran PKN. *Confrence Of Elementary Studies*, 523–531.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Rohmawati, R. (2012). *Implementasi pendidikan politik dalam pemeblajaran pendidikan kewarganegaraan guna pengembangan budaya demokratis di SMA Negeri Sekabupaten Bantul*.
- Rustam, Suwandi Memen, Namla Elfa Syariati, And Puspita Herdianti Anwar . "Konsep Amanah: Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol. 7, No. 2 (Desember 2021): 237–255.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosia*, 25(1), 24–40.
- Shalihudin, F., & Hermanto, F. (2021). Peran Pendidikan Politik Dalam Membangun Sikap Demokratis Siswa Melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah Di SMP Negeri 22 Semarang. *Sosiolium*, 3(1), 75–82.
- Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231.
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>
- Sulianti, A. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Budaya Multikultural untuk Menanamkan Sikap Patriotisme Warga Negara. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 48–55.
- Sulistiyowati, Norita Citra, and Fitryah Elok. "Implementasi Sistem
-

- Keuangan Desa (Siskeudes)
Studi Kasus pada Desa Besuki
Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo." *International Journal
of Social Science and Business*
Vol. 3, No. 3 (july 2019): 300-305.
- Tirza, J., & Cendana, W. (2021).
Peranan Pancasila sebagai
Pembentuk Karakter Generasi
Muda Indonesia Dalam
Menghadapi Arus Globalisasi.
*JPK: Jurnal Pancasila Dan
Kewarganegaraan*, 6(2), 23–32.
- Usman, H., Nurhasanah, N., &
Wulandari, Y. (2022).
*Pengembangan Lembar Kerja
Peserta Didik Elektronik Berbasis
Pendidikan Karakter pada
Pembelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan
di Sekolah Dasar*. 6(2), 3120–
3128.